



Rencana Kerja (RENJA)

Tahun Anggaran 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sedang dalam ayat (2) Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Recana Kerja (Renja) Tahun 2025.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Dikbud NTB mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dikbud Provinsi NTB dapat dilaksanakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini terutama tentang pembagian wewenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja satu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dikbud Provinsi NTB 2024– 2026.

Proses penyusunan Renja Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang, Sekretariat, Cabang Dinas dan UPT, selanjutnya melakukan analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD satu tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra SKPD serta memperhatikan rancangan awal RKPD dan tidak terlepas juga dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renja Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Dikbud, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 5 Januari 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 disusun dengan maksud memberikan panduan bagi SKPD dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menetapkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025;
- b. Menetapkan indikator kinerja dari program dan kegiatan yang disertai indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang bersumber dari APBD;
- c. Mengukur/mengevaluasi pencapaian target kinerja Dinas Dikbud Provinsi NTB;

- d. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Dikbud Provinsi NTB.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja RPD dan RENSTRA SKPD Tahun 2024.
- 2.4. Permasalahan.
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025

Bab IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN 2024

Total PAGU belanja pada APBD yang dikelola oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2024, sebesar Rp. **1.798.366.643.690,-** dengan realisasi keuangan sampai bulan September 2024 sebesar Rp. 973.409.716.534 atau 54,13% dan realiasi fisik mencapai 63,22 %.

Alokasi anggaran tersebut di atas, tersebar pada masing-masing unit/bidang sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Anggaran pada Dinas Dikbud Provinsi NTB
Sampai Dengan Bulan September 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH	Realisasi		% keu	% fisik	SISA PAGU ANGGARAN
			s.d. Bulan September				
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.339.511.000	1.300.069.746	5,820	5,82		21.039.441.254
II	BELANJA	1.798.366.643.690	973.409.716.534	54,13	63,22		824.956.927.156
1	Dinas Dikbud Provinsi NTB	1.798.366.643.690	973.409.716.534	54,13	63,22		814.336.600.556
2	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	389.498.000	79.479.000	20,41	31,78		310.019.000
3	Taman Budaya	3.060.916.600	366.513.484	11,97	12,39		2.694.403.116
4	Museum Negeri	2.984.048.000	390.016.488	13,07		13,47	2.594.031.512
5	Cabang Dinas Lombok Barat – Mataram	489.382.500	107.254.000	21,92	23,96		382.128.500
6	Cabang Dinas Lombok Tengah	675.470.800	74.617.072	11,05	11,79		600.853.728
7	Cabang Dinas Lombok Timur	652.473.700	106.848.054	16,38	16,77		545.625.646
8	Cabang Dinas Lombok Utara	436.119.000	40.000.000	9,17	10,32		396.119.000
9	Cabang Dinas Sumbawa Barat	327.925.200	20.000.000	6,10	6,10		307.925.200
10	Cabang Dinas Sumbawa	603.269.000	61.810.550	10,25	10,25		541.458.450
11	Cabang Dinas Dompu	338.224.400	22.500.000	6,65	6,65		315.724.400
12	Cabang Dinas Bima - Kota Bima	662.999.400	45.000.000	6,79	7,92		617.999.400
BELANJA SKPD		1.798.366.643.690	973.409.716.534	63,22	54,13		824.956.927.156

Dari table diatas terlihat bahwa keterserapan anggaran baru mencapai 63,22% dan fisik 54,13% hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Untuk Anggaran yang bersumber dari DAK ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan juknis ketentuan penggunaan DAK sehingga mengalami kendala saat pelaksanaan, seperti ketidak sesuaian alahan dengan kondisi yang dipersyaratkan, ketersediaan bahan dengan spek tertentu terbatas, dll;
2. Untuk penerapan SPM terait dengan pemberian buku tulis dan alat tulis sudah dilakukan pendistribusin ke kabupaten / kota kepada siswa yang berhak menerima namun demikian untuk semester II (dua) proses pendistribusian belum dilakukan;
3. Ada beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian baik itu penyesuaian terkait waktu, sasaran dan penyesuaian lainnya sehingga jadwal pelaksanaannya menjadi mundur;

SOLUSI :

1. Untuk segera melakukan penyesuaian sesuai juknis namun jika terdapat kendala yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaannya sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak pusat atau Kemendikbud untuk mencari solusi penanganan yang tepat;
2. Pendataan penerima SPM bidang pendidikan harus dilakukan lebih awal sehingga pelaksanaan juga dapat dilakukan lebih awal sehingga pendistribusian bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Segera melakukan penyesuaian melalui anggaran perubahan agar penyesuaian tersebut dapat terdokumentasi ke dalam dokumen perencanaan dalam hal ini dokumen perencanaan yaitu DPAP dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA RPMD DAN RENSTRA SKPD TAHUN 2024.

2.2.1 URUSAN PENDIDIKAN :

Dalam RPD NTB 2024-2026, pada dimensi Manusia (People), dengan tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta Derajat Kesehatan Masyarakat”, terdapat 2 (dua) indikator utama yang menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urusan pendidikan yaitu

Rata-rata Lam Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), oleh karena itu semua kebijakan strategis yang diambil haruslah mendukung ketercapaian 2 (dua) indikator tersebut. Target dan capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PENDIDIKAN							
1.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,73	13,96	13,79	13,97	9,39	NA (Belum Rilis BPS)
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,04	7,61	7,07	7,74	16	NA (Belum Rilis BPS)

Sumber : BPS Provinsi NTB ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa kedua indikator Pendidikan tersebut belum dapat dilaporkan capaiannya untuk tahun 2024 karena belum rilis oleh BPS namun demikian capaian untuk indikator ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang termasuk pada jenjang Sekolah Menengah (SM) yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak-anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2023 capaian untuk indikator HLS sebesar 13,97 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 point jika dibandingkan dengan tahun

2022 yaitu 13,96 tahun artinya harapan lama sekolah penduduk NTB yaitu setara dengan Diploma Dua semester dua.

Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal, dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir/selesai, tanpa memperhitungkan apakah tinggal kelas atau tidak. Angka ini juga bisa menggambarkan kualitas pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah. RLS tahun 2023 sebesar 7,74 tahun meningkat 0,13 point jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 7,61 tahun artinya rata-rata lama sekolah penduduk NTB berada di kelas VII SMP semester 1.

Untuk mencapai target 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan dalam RPD maka telah disusun tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang memuat strategi, kebijakan serta program kegiatan yang mendukung terwujudnya pencapaian Indikator Utama Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA dinas. Indikator Kinerja dalam RENSTRA 2024-2026 yang menjadi target tahunan yang harus dicapai oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTB tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun sesuai
Renstra 2024-2026

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
PENDIDIKAN					
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,79 Tahun	13,97 Tahun	9,39 Tahun	NA (Belum Rilis BPS)
2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,07 Tahun	7,74 Tahun	16 Tahun	NA (Belum Rilis BPS)
3	Persentase APK SMA/MA/SMK/Paket C	100 %	115,78 %	100 %	Dalam Proses Perhitungan
4	Persentase APM SMA/MA/SMK/Paket C	98,10%	98,50 %	98,60 %	Dalam Proses Perhitungan
5	Persentase APS SMA/MA/SMK/Paket C	98,55%	98,85 %	98,88 %	Dalam Proses Perhitungan

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	APS SLB	86,85%	87,74 %	87,84 %	Dalam Poses Perhitungan
7	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B	76,25%	65,82 %	65,87 %	Dalam Poses Perhitungan
8	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	54,76%	55,56 %	55,60 %	Dalam Poses Perhitungan
9	Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	67%	67,32 %	67,50 %	15,12%
10	Persentase lulusan SMK yang terserap	37%	54 %	55 %	16,61%
11	Persentase penerapan SPM Pendidikan Menengah	NA	NA	100	67,87
12	Persentase penerapan SPM Pendidikan Khusus	NA	NA	100	53,85
	KEBUDAYAAN				
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55	57,37	55-60	NA (belum dirilis)
14	Persentase OPK yang dikembangkan	80%	83,33 %	83,33 %	75%

Sumber: Dinas Dikbud, Provinsi NTB, BPS NTB, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Pendidikan yang merupakan Indikator tujuan dan sasaran pada RENSTRA dinas tahun 2024 - 2026 terdapat 14 (empat belas) indikator yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator urusan pendidikan dan 2 (dua) indikator urusan kebudayaan. Hampir semua indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini karena sedang dalam tahapan pendataan dan pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024. Terdapat 3 (tiga) indikator yang belum tersedia realisasinya karena belum dirilis oleh BPS yaitu HLS dan RLS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu IPK, kemudian ada 6 (enam) indikator yang sedang dalam tahap perhitungan yaitu APK, APM, APS, APS SLB, akreditasi pendidikan menengah, akreditasi pendidikan khusus karena data ini paling cepat dapat diakses di awal November menunggu semua sekolah melakukan updating pada data pada DAPODIK mereka, sedangkan 3 (tiga) indikator yang lain yaitu persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Persentase Lulusan SMK yang terserap dan persentase OPK yang dikembangkan capaiannya masih dibawah target

karena pendataan tracer study yang dilakukan oleh satuan pendidikan sedang berlangsung maksimal sampai dengan bulan Desember 2024 begitu juga dengan urusan kebudayaan sedang dalam proses pelaksanaan.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta UPTD-nya yaitu Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP); UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Barat-Mataram; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Tengah, UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Timur; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Utara; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Sumbawa Barat; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Sumbawa; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Dompu; dan UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Bima-Kota Bima.

Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumberdaya manusia. Pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi NTB. Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan sumberdaya manusia bagi pembangunan. Pendidikan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan keterampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hakikat pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial, ekonomi penduduk suatu daerah.

Beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Haraparan Lama Sekolah antara lain: peningkatan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti penambahan ruang kelas, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum, pembangunan perpustakaan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, rehab ruang guru, Pembangunan dan rehab jamban dan kegiatan fisik lainnya. Selain itu bagi sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa yang menjadi wewenang pemerintah provinsi juga mendapat perhatian dalam hal peningkatan akses dan pengadaan sarana prasarana

sekolah. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan dilakukan juga melalui revitalisasi kurikulum, peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, Refocusing Core Bisnis pada SMK, melakukan Mou dengan Lembaga Pemerintah maupun Industri dan Dunia Kerja terkait penyesuaian kebutuhan dunia kerja dengan lulusan SMK, kegiatan penerbitan surat edaran terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi untuk SMA sehingga bagi siswa yang kurang mampu dapat terserap atau melanjutkan sekolahnya di sekolah yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan demikian akan menghemat biaya transportasi bagi siswa kurang mampu tersebut. Selain itu, surat edaran terkait PPDB juga memberikan kebebasan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu pemegang kartu PIP.

Salah satu bentuk penilaian tentang pemanfaatan fasilitas pendidikan dilihat dari partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi sekolah mempengaruhi rata-rata lama sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa umurnya.

Tabel 2.2.1.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB
Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH THN 23	BANYAK SISWA				TOTAL SM	APK SM
			SMA	SMK	MA	PAKET C		
1	Kota Mataram	18701	9873	6825	2575	474	19747	105,59
2	Kab. Lombok Barat	28403	12311	11302	10900	1249	35762	125,91
3	Kab. Lombok Tengah	29043	17324	12520	12180	1584	43608	150,15
4	Kab. Lombok Timur	54692	20453	14604	21243	2173	58473	106,91
5	Kab. Lombok Utara	10188	5289	2458	2387	941	11075	108,71
6	Kab. Sumbawa Barat	5864	3563	1663	907	132	6265	106,84
7	Kab. Sumbawa	18806	9985	6172	2418	1380	19955	106,11
8	Kab. Dompu	13332	7243	3900	1834	2021	14998	112,50
9	Kab. Bima	20242	12570	4334	3551	1172	21627	106,84
10	Kota Bima	7594	3637	1869	1897	591	7994	105,27
JUMLAH		206.865,00	102.248,00	65.647,00	59.892,00	11.717,00	239.504,00	115,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun berjumlah 206.865 orang dan jumlah peserta didik yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA dan Paket C) tanpa memandang umur sebanyak 239.504 orang sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2024 berjumlah 115,78 %. Angka ini mencapai angka seratus persen artinya ada anak dari provinsi lain yang sedang bersekolah di provinsi NTB, ada anak yang usianya masih di bawah 16 tahun namun sudah berada pada jenjang pendidikan menengah dan begitu juga sebaliknya ada anak yang sudah berusia lebih dari 18 tahun namun masih bersekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak dengan umur tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.1.4
Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK, Paket C)
Provinsi NTB Tahun Tahun 2022 / 2023

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH	BANYAK SISWA USIA 16-18TH					APM SM
			SMA	SMK	MA	PAKET C	TOTAL	
1	Kota Mataram	18.701	9.616	6.528	2.210	289	18.643	99,7%
2	Kab. Lombok Barat	28.403	10.510	9.234	7.705	813	28.262	99,5%
3	Kab. Lombok Tengah	29.043	12.169	8.416	6.550	904	28.039	96,5%
4	Kab. Lombok Timur	54.692	19.793	13.833	18.975	1120	53.721	98,2%
5	Kab. Lombok Utara	10.188	5.124	2.288	2.030	650	10.092	99,1%
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	3.419	1.555	772	76	5.822	99,3%
7	Kab. Sumbawa	18.806	9.759	5.924	2.130	927	18.740	99,6%
8	Kab. Dompu	13.332	6.827	3.648	1.602	830	12.907	96,8%
9	Kab. Bima	20.242	12.126	4.089	3.246	599	20.060	99,1%
10	Kota Bima	7.594	3.550	1.817	1.802	379	7.548	99,4%
JUMLAH		206.865	92.893	57.332	47.022	6587	203.834	98,5%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun di provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 206.865 orang sedangkan jumlah peserta didik usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah sebanyak 203.834 orang sehingga APM pendidikan menengah adalah sebesar 98,50% artinya masih ada anak usia 16 - 18 tahun yang belum bersekolah di jenjang pendidikan menengah yaitu sebesar 1,50%. hal ini disebabkan karena anak tersebut Drop Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan artinya pernah bersekolah sampai jenjang SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang Menengah, Belum Pernah Bersekolah sama sekali, atau anak tersebut bersekolah namun pada pondok pesantren yang tidak menerbitkan ijazah karena hanya fokus belajar agama.

Selain APK dan APM untuk mengukur partisipasi sekolah disebuah wilayah digunakan juga Angka Partisipasi Sekolah (APS) dimana angka ini menggambarkan jumlah penduduk usia tertentu misalnya usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di jenjang manapun seperti di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket C. Data APS di provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.5
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi NTB Tahun Tahun 2022 / 2023

NO.	KAB / KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN	BANYAK SISWA USIA 16-18TH							APS (%)	
			SMA	SMK	MA	PAKET C	SMP	MTs	TOTAL		
1	Kota Mataram	18.701	9.616	6.528	2.210	289	12	14	18.669	99,83	
2	Kab. Lombok Barat	28.403	10.510	9.234	7.705	813	48	78	28.388	99,95	
3	Kab. Lombok Tengah	29.043	12.169	8.416	6.550	904	67	27	28.133	96,87	
4	Kab. Lombok Timur	54.692	19.793	13.833	18.975	1.120	79	52	53.852	98,46	
5	Kab. Lombok Utara	10.188	5.124	2.288	2.030	650	7	21	10.120	99,33	
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	3.419	1.555	772	76	10	18	5.850	99,76	
7	Kab. Sumbawa	18.806	9.759	5.924	2.130	927	21	10	18.771	99,81	
8	Kab. Dompu	13.332	6.827	3.648	1.602	830	67	45	13.019	97,65	
9	Kab. Bima	20.242	12.126	4.089	3.246	599	25	46	20.131	99,45	
10	Kota Bima	7.594	3.550	1.817	1.802	379	5	10	7.563	99,59	
		TOTAL	206.865	92.893	57.332	47.022	6.587	341	321	204.496	98,85

Sumber Data : DAPODIK, Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2023.

Dari tabel diatas tampak bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun di provinsi NTB sebanyak 206.865 orang dan jumlah peserta didik usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di beberapa jenjang yaitu 204.496 sehingga total APS adalah 98,85 persen, artinya masih ada anak usia 16 - 18 tahun yang belum bersekolah sebanyak 1,15 persen yang dapat disebabkan karena putus sekolah atau Drop

Out, Lulus tidak melanjutkan, belum pernah sekolah ataupun bersekolah namun di ponpes yang tidak menerbitkan ijazah karena fokus belajar agama. Selain itu dari hasil capaian APS kita dapat melihat bahwa ada beberapa anak yang usianya sudah mencapai 16 - 18 tahun namun masih berada di jenjang dibawahnya atau jenjang diatasnya hal ini dapat sebabkan karena anak tersebut terlambat masuk sekolah, tinggal kelas, mengikuti kelas akselerasi, masuk sekolah lebih awal atau pernah berhenti sekolah dan masuk kembali. Dengan diketahuinya berberapa faktor pembentuk terjadinya APK, APM dan APS maka dapat diantisipasi dengan menerapkan kebijakan yang sesuai misalnya penentuan usia anak masuk SD.

Kewenangan Provinsi dalam bidang pendidikan adalah menangani anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas maka digunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SLB sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.6
Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SLB
Provinsi NTB Tahun 2022 / 2023

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS USIA 4 - 18	PESERTA DIDIK SLB				TOTAL	APS SLB (%)
			4 s.d. 5 tahun	6 s.d. 12 Tahun	13 s.d. 15 Tahun	16 s.d 18 Tahun		
1	Kota Mataram	399	10	198	108	109	425	106,52
2	Kab. Lombok Barat	428	3	153	80	105	341	79,67
3	Kab. Lombok Tengah	742	12	223	111	172	518	69,81
4	Kab. Lombok Timur	727	14	312	152	236	714	98,21
5	Kab. Lombok Utara	196	1	56	21	29	107	54,59
6	Kab. Sumbawa Barat	310	0	20	12	23	55	17,74
7	Kab. Sumbawa	347	0	119	68	92	279	80,40
8	Kab. Dompu	264	13	154	83	104	354	134,09
9	Kab. Bima	583	18	177	161	344	700	120,07
10	Kota Bima	383	1	70	54	224	349	91,12
TOTAL		4.379	72	1.482	850	1438	3.842	87,74

Sumber Data : DAPODIK, Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2023.

Dari tabel diatas terlihat bahwa APS - SLB sebesar 87,74% artinya masih ada anak berkebutuhan khusus sebesar 12,26% yang belum berpartisipasi pada pendidikan khusus / SLB. Salah satu penyebab mendasar rendahnya APS-SLB karena adanya paradigma di masyarakat bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus adalah hal yang memalukan sehingga cenderung ditutupi sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak dasarnya termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Untuk mengukur ketersediaan akses pendidikan maka kita dapat melihatnya dari capaian APK, APM, dan APS sedangkan untuk mengukur kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri indikator yang digunakan dan tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024 - 2026 adalah angka melanjutkan lulusan SMA ke perguruan tinggi dan keterserapan lulusan SMK.

Angka lulusan SMA yang terserap ke perguruan tinggi ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan SMA, dimana salah satu tujuannya adalah lulusan SMA harus mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Data lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.2.1.7

**Angka Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)
Provinsi NTB Tahun 2024**

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah PD Lulus	Jumlah Yang Melanjutkan ke PT	Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke PT
1	Kab. Bima	3.672	843	22,96
2	Kab. Dompu	2.218	585	26,38
3	Kab. Lombok Barat	1.802	809	44,89
4	Kab. Lombok Tengah	3.010	827	27,48
5	Kab. Lombok Timur	3.776	1.041	27,57
6	Kab. Lombok Utara	979	494	50,46
7	Kab. Sumbawa	2.494	877	35,16
8	Kab. Sumbawa Barat	970	647	66,70
9	Kota Bima	1.012	562	55,53
10	Kota Mataram	2.796	561	20,06
TOTAL		22.729	7.246	31,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi sebesar 31,88 persen atau sebanyak 7.246 orang dari total lulusan 22.729 orang. Ini menunjukkan bahwa capaian sampai dengan bulan September 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Dikbud 2024 - 2026 yaitu 67,50% hal ini disebabkan karena beberapa hak yaitu (1) asistensi pengisian Tracer Study untuk tahun 2024 baru dilakukan pada sekolah negeri saja dan untuk sekolah swasta akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober 2024 (2) batas akhir pengisian aplikasi tracer study adalah bulan

Desember 2024 mengingat jadwal penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi masih berlangsung sampai bulan September terutama bagi perguruan tinggi swasta, oleh karena itu capaian ini diharapkan akan mengalami peningkatan sampai dengan akhir Desember 2024.

Untuk mengukur mutu pendidikan SMK indikator yang digunakan adalah keterserapan lulusan SMK yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (1) lulusan yang terserap ke dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), (2) lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan (3) lulusan yang berwirausaha.

Berikut data lulusan SMK yang terserap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.8
Angka Lulusan SMK yang Terserap
Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah PD Lulus	Jumlah Yang Melanjutkan ke PT	Jumlah Yang Bekerja	Jumlah Yang berwirausaha	Total Lulusan Terserap	Percentase lulusan SMK yang terserap
1	Kab. Bima	746	98	146	11	255	34,18
2	Kab. Dompu	1059	46	39	11	96	9,07
3	Kab. Lombok Barat	2528	55	101	0	156	6,17
4	Kab. Lombok Tengah	777	34	59	12	105	13,51
5	Kab. Lombok Timur	2678	72	30	29	131	4,89
6	Kab. Lombok Utara	474	34	95	0	129	27,22
7	Kab. Sumbawa	920	39	177	30	246	26,74
8	Kab. Sumbawa Barat	640	34	304	2	340	53,13
9	Kota Bima	746	34	31	0	65	8,71
10	Kota Mataram	897	34	153	0	187	20,85
TOTAL		11.465	480	1.135	95	1.710	14,91

Sumber data : REL Program, DIKBUD Provinsi NTB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan September 2024 jumlah lulusan SMK yang bekerja 480 orang, melanjutkan ke perguruan tinggi adalah sebesar 1.135 orang, dan berwirausaha sebanyak 95 orang sehingga total lulusan SMK yang terserap sebanyak 1.710 orang atau sebesar 14,91% dari total lulusan ditahun 2024 yaitu 11.465 orang. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu (1) asistensi pengisian Tracer Study untuk tahun 2024 baru dilakukan pada sekolah negeri saja dan untuk sekolah swasta akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober 2024 sehingga yang aktif mengisi aplikasi hanya sekolah negeri saja (2)

batas akhir pengisian aplikasi tracer study adalah bulan Desember 2024 mengingat durasi perhitungan indikator ini dilakukan sejak peserta didik lulus sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Desember di tahun bersangkutan dan angka capain diaharapkan akan terus meningkat sampai akhir Desember 2024.

Selain 2 (dua) indikator diatas untuk mengukur mutu pendidikan digunakan akreditasi sekolah baik akreditasi pendidikan menengah maupun akreditasi pendidikan khusus. Berkut data capaian akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Tabel 2.2.1.9
Akreditasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Tahun 2024

No.	Kab./Kota	Status Akreditasi SMA				Jumlah Akreditasi A+B	Jumlah Akreditasi A+B+C	Percentase Akreditasi Minimal B
		A	B	C	TT			
1	Kabupaten Bima	26	13	14	2	39	53	73,58
2	Kabupaten Dompu	8	8	12	1	16	28	57,14
3	Kabupaten Lombok Barat	12	12	8	1	24	32	75,00
4	Kabupaten Lombok Tengah	19	18	19		37	56	66,07
5	Kabupaten Lombok Tjimur	24	38	8		62	70	88,57
6	Kabupaten Lombok Utara	4	4	6		8	14	57,14
7	Kabupaten Sumbawa	13	13	3	1	26	29	89,66
8	Kabupaten Sumbawa Barat	4	4	2		8	10	80,00
9	Kota Bima	6	8	2		14	16	87,50
10	Kota Mataram	19	6	5		25	30	83,33
TOTAL		135	124	79	5	259	338	76,63
No.	Kab./Kota	Status Akreditasi SMK				Jumlah Akreditasi A+B	Jumlah Akreditasi A+B+C	Percentase Akreditasi Minimal B
		A	B	C	TT			
1	Kabupaten Bima		11	11	2	11	22	50
2	Kabupaten Dompu	3	6	14	1	9	23	39,13
3	Kabupaten Lombok Barat	3	24	17	1	27	44	61,36
4	Kabupaten Lombok Tengah	3	26	40	1	29	69	42,03
5	Kabupaten Lombok Tjimur	6	39	41	3	45	86	52,33
6	Kabupaten Lombok Utara		5	8		5	13	38,46
7	Kabupaten Sumbawa	3	13	3		16	19	84,21
8	Kabupaten Sumbawa Barat		5	1	1	5	6	83,33
9	Kota Bima	5	2	4		7	11	63,64
10	Kota Mataram	10	8	3	1	18	21	85,71

TOTAL	33	139	142	10	172	314	54,78
GRAND TOTAL	168	263	221	15	431	652	66,10

Dari tabel diatas terlihat bahwa akreditasi SMA minimal B sebesar 76,63% yang diperoleh dari jumlah SMA yang telah terakreditasi A dan B yaitu sebanyak 259 SMA dibagi dengan jumlah yang telah terakreditasi A,B dan C sebanyak 338 SMA. Sedangkan untuk SMK jumlah yang telah terakreditasi A dan B adalah sebanyak 172 SMK dan dibagi dengan jumlah SMK yang terakreditasi A, B dan C sehingga tercapai angka 54,78%. dan untuk total akreditasi pendidikan menengah dengan formulasi seperti diatas diperoleh angka capaian yaitu 66,10 dan angka ini belum mencapai target yang ditetapkan karena akreditasi Satuan pendidikan dilakukan setiap 4 tahun sekali, jika mendapatkan persetujuan atau kuota, dan pada saat melakukan cutt off pada DAPODIK belum terdapat penambahan data akreditasi hal ini bisa disebabkan karena memang belum ada status akreditasi baru atau sekolah belum melakukan updating status akreditasinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Dikbud Provinsi NTB berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Capaian Penerapan SPM bidang pendidikan tahun anggaran 2024 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1.10
CAPAIAN PENERAPAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024
TRIWULAN III

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA				82.97 %
Pendidikan Menengah					98.75 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	29000	29965	-965	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.75 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	93.74 %
SMA					96.26 %

1 . Angka partisipasi kasar	%	100	115.87	-15.87	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.85	98.80	0.049999999999997	99.95 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	41	56.89	-15.89	100.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	33.85	53.59	-19.74	100.00 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.72	4.61	-0.89	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.57	2.31	-0.74	100.00 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	67.67	67.60	0.07000000000000007	99.90 %
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	66.92	71.70	-4.78	100.00 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.72	55.46	0.26	99.53 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	97	59.57	37.43	61.41 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.45	0.44	0.01	97.78 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50	46.43	3.57	92.86 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	1.43	4.48	-3.05	100.00 %
SMK					91.21 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	100	115.87	-15.87	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.85	98.80	0.049999999999997	99.95 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	27.82	44.50	-16.68	100.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	23.87	45.240	-21.37	100.00 %
5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	37.50	84.94	-47.44	100.00 %
6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	100	100	0	100.00 %
7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.89	3.5	-0.61	100.00 %
8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.13	1.84	-0.71	100.00 %
9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	62.53	67	-4.47	100.00 %
10 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62.58	70.37	-7.79	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %
12 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53.80	52.03	1.77	96.71 %
13 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0.37	30.30	-29.93	100.00 %
14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	58.25	41.64	16.61	71.48 %
15 . Proporsi PTK penggerak	%	1.43	4.48	-3.05	100.00 %
Pendidikan Khusus					67.19 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	48.69 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1400	852	548	60.86 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.50 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	 	92.50 %

1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	87.83	87.74	0.0900000000000003	99.90 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	43.61	64	-20.39	100.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	30.46	37.32	-6.86	100.00 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4	4.75	-0.75	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3.41	-0.41	100.00 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69.83	71.12	-1.29	100.00 %
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62.94	60.71	2.23	96.46 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.71	56.07	0.64	98.87 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	64.50	19.66	44.84	30.48 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.20	0.37	-0.17	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	53.36	41	12.36	76.84 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2	3.12	-1.12	100.00 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Indeks pencapaian SPM dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Triwulan III adalah 82,92% atau Tuntas Madya, dan jumlah total peserta didik yang harus dilayani adalah 29.000 orang dengan realisasi 20.965 orang atau melampaui target yang telah ditetapkan dimana capaian realisasi sebesar 103,34%
- Indikator SPM yang ada pada jenjang SMA berjumlah 13 indikator yang terdiri dari :
 - APK dengan capaian 115.87% telah melampaui target yang ditetapkan
 - APS dengan capaian 98.85% melampaui target yang ditetapkan namun belum mencapai 100%
 - Kemampuan Literasi dengan capaian 56,89% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 - Kemampuan numerasi dengan capaian 53,59% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 - Perbedaan Skor Literasi dengan capaian 4,61% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 - Perbedaan Skor Numerasi dengan capaian 2,31 melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional

7. Indek Iklim Keamanan dengan capaian 67,60 belum mencapai target yang ditetapkan namun diatas capaian nasional
 8. Indeks Iklim Kebhinekaan dengan capaian 71,70 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
 9. Indeks Iklim Inklusivitas dengan capaian 55,46 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 10. Kecukupan formasi guru dengan capaian 59,57 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 11. Indeks distribusi guru dengan capaian 0,44 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 12. Proporsi PTK bersertifikat dengan capaian 46,43 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 13. Proporsi PTK Penggerak dengan capaian 4,48 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
- c) Indikator SPM yang ada pada jenjang SMK berjumlah 15 indikator yang terdiri dari :
1. APK dengan capaian 115.87% telah melampaui target yang ditetapkan
 2. APS dengan capaian 98.85% melempau target yang ditetapkan namun belum mencapai 100%
 3. Kemampuan Literasi dengan capaian 44,50% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 4. Kemampuan numerasi dengan capaian 45,24% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 5. Tingkat penyerapan lulusan SMK dengan capaian 84,94 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
 6. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK dengan capaian 100% melebihi target yang ditetapkan dan melampaui target nasional
 7. Perbedaan Skor Literasi dengan capaian 3,5% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional

8. Perbedaan Skor Numerasi dengan capaian 1,84 melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 9. Indek Iklim Keamanan dengan capaian 67 melampaui target yang ditetapkan namun diatas capaian nasional
 10. Indeks Iklim Kebhinekaan dengan capaian 70,37 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
 11. Indeks distribusi guru data capaian tidak tersedia di raport pendidikan
 12. Indeks Iklim Inklusivitas dengan capaian 52,03 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 13. Kecukupan Formasi ASN guru dengan capaian 30,30 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 14. Proporsi PTK bersertifikat dengan capaian 41,64 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 15. Proporsi PTK Penggerak dengan capaian 4,48 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
- d) Indiaktor SPM yang ada pada jenjang SLB berjumlah 15 indikator yang terdiri dari :
1. APS dengan capaian 87.74% melampaui target yang ditetapkan namun belum mencapai 100%
 2. Kemampuan Literasi dengan capaian 64% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 3. Kemampuan numerasi dengan capaian 37,32% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 4. Perbedaan Skor Literasi dengan capaian 4,75% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 5. Perbedaan Skor Numerasi dengan capaian 3,41% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
 6. Indek Iklim Keamanan dengan capaian 71,12 melampaui target yang ditetapkan namun diatas capaian nasional

7. Indeks Iklim Kebhinekaan dengan capaian 60,71 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
 8. Indeks distribusi guru dengan capaian 0,37 capaian melampaui target yang ditetapkan namun masih berada di bawah nasional
 9. Indeks Iklim Inklusivitas dengan capaian 56,07 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 10. Kecukupan Formasi ASN guru dengan capaian 19,66 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 11. Proporsi PTK bersertifikat dengan capaian 41, belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
 12. Proporsi PTK Penggerak dengan capaian 3,12 melampaui target yang ditetapkan namun dibawah capaian nasional
- e) Pemenuhan SPM pada jenis barang berupa buku tulis dan alat tulis pada tahun 2024 sudah dilaksanakan. Jumlah penerima yang berasal dari jenjang SMA adalah 900 orang peserta didik miskin. Sedangkan penerima yang berasal dari jenjang SMK juga berjumlah 900 orang dan untuk SLB jumlah penerima sebanyak 425 orang.
- f) Pemenuhan SPM pada jenis jasa, yaitu penyediaan biaya personil peserta didik kepada peserta didik penyandang disabilitas yang tinggal di Asrama sekolah. Ada 9 (sembilan) SLB yang memiliki asrama yaitu : SLBN 1 Lombok Barat, SLBN 1 Lombok Tengah, SLBN 2 Lombok Tengah, SLBN A YPTN, SLBN 1 Sumbawa, SLBN 1 Sumbawa, SLBN 1 Dompu, SLBN 1 Bima, SLBN 1 Lotim, SLBN 2 Lotim. Jumlah anak yang dilayani pada 9 (Sembilan) asrama tersebut berjumlah 113 (serratus tiga belas) Orang

2.2.2. URUSAN KEBUDAYAAN

Dalam RPD NTB 2024-2026, pada dimensi Manusia (People), dengan tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal

dan Taqwa (KUAT), terdapat 1 (satu) indikator bidang kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), oleh karena itu semua kebijakan strategis yang diambil haruslah mendukung ketercapaian) indikator tersebut. Target dan capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK)	50	56,60	55	57,37	54-60	NA (Belum Rilis)

Sumber : Kemendikbudristek RI

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator urusan kebudayaan yaitu IPK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2023 meningkat sebesar 0,77 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, sedangkan capaian untuk tahun 2024 belum tersedia karena belum dirilis oleh Kemendikbudristek RI.

Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan bersama dengan 2 (dua) UPTD-nya yaitu Taman Budaya dan Museum Negeri. Untuk mencapai target indikator urusan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPD maka telah disusun tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang memuat strategi, kebijakan serta program kegiatan yang mendukung terwujudnya

pencapaian Indikator Utama Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA dinas. Indikator Kinerja dalam RENSTRA 2024-2026 yang menjadi target tahunan yang harus dicapai oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTB tahun 2024 untuk urusan kebudayaan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Sesuai RENSTRA 2024-2026

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	100%	83,33%	100%	83,33%	83,33%	75%

Sumber : Dinas DIKBUD Provinsi NTB, tahun 2024

Dari table diatas terlihat bahwa capaian indikator pengembangan OPK tampak stagnan atau tetap hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran yang terjadi hampir setiap tahun sehingga dari 12 OPK yang ada hanya mampu diintervensi sebanyak 10 (sepuluh) OPK pada tahun 2022 dan 2023 yaitu : (1) tradisi lisan (2). cagar budaya (3) manuskrip (4) adat istiadat (5) ritus (6) pengetahuan tradisional (7) seni; (8) Bahasa (9) permainan rakyat; (10) olahraga tradisional dan yang belum dapat diintervensi yaitu 2 (dua) OPK karena membutuhkan dukungan dana yaitu (1) teknologi tradisional dan (2) indikasi geografis. Sedangkan untuk tahun 2024 telah dilakukan pengembangan OPK sebanyak 9 (Sembilan) OPK atau sebesar 75% dari target yang ditetapkan diharapkan diakhiri tahun 2024 semua OPK dapat diintervensi sehingga capaian mencapai 100%.

Dalam menjalankan tusi pada ursuan kebudayaan dinas DIKBUD Provinsi NTB dibantu oleh bidang kebudayaan, UPT Museum dan Taman Budaya, berikut capaian kinerja di tahun 2024 pada masing-masing bidang/UPT tersebut.

a. Bidang Kebudayaan

Untuk mendukung pengembangan OPK terdapat kinerja bidang kebudayaan yaitu pesersentase cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian sebagaimana yang termuat pada table dibawah ini :

Tabel : Tabel 2.2.1.3
Daftar Cagar Budaya yang Dilestarikan s.d. Tahun 2024

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	JENIS CAGAR BUDAYA	TINGKAT CAGAR BUDAYA	NOMOR SK
1	Taman Narmada	Situs	Nasional	SK Menteri ; 243/M/2015 (<u>Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya</u>)
2	Taman Lingsar	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
3	Taman Mayure	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
4	Pura Meru Cakra Negara	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
5	Masjid Rembitan	<u>Bangunan</u>	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
6	Masjid GunungPujut	<u>Bangunan</u>	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
7	Masjid Kuno Bayan Beleg	<u>Bangunan</u>	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
8	Masjid RaudatulMuttaqin	<u>Bangunan</u>	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
9	Makan Serewa	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
10	Kompleks Makan Selaparang	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ; PM.19/PW.007/MKP/2007
11	Istana Bima " ASI Mbolo"	<u>Bangunan</u>	Nasional	SK Menteri ; 205/M/2016 (<u>Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya</u>)
12	Gua Jegang Pink - Lotim	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-858 Tahun 2023
13	Kapal Berselaruh Pantai Dendapak Pohgading	Benda	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-859 Tahun 2023
14	Makam Batu Mulut	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-860 Tahun 2023
15	Istana Dalam Loka	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
16	Bala Datu Ranga	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
17	Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
18	Istana Bala Kuning	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
19	Eks Kantor Kontrolir India Belanda	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
20	Makam Dewa Ling Gunung Sativa (Datu Puti Geti)	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
21	Sarkofagus Al-Renung	Benda dan Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
22	Bala Dea Imam Empang	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
23	Bala Dea Busing Lape	<u>Bangunan</u>	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
24	Komplek Makam Krongkeng	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
25	Makam Faqih Ismail dan Syarif Maulana Aly	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
26	Sarkofagus Reboran	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023

Dari table diatas ini terlihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam cagar budaya) yang penetapannya telah dilakukan dari tahun 2015, namun tahun 2024 belum ada penetapan baru karena terbatasnya SDM penilai dalam hal ini tim ahli cagar budaya yang ada ditingkat provinsi hanya berjumlah 1 (satu) orang, selain itu Lokasi cagar budaya yang tersebar di kabupaten /kota perlu dilakukan monitoring namun demikian anggaran sangat terbatas, setelah dilakukan identifikasi cagar budaya melalui monitoring tersebut akan dilakukan proses pendaftaran cagar budaya, namun anggaran untuk memfasilitasi tim pendaftaran cagar budaya untuk tahun 2024 tidak tersedia mengingat pembiayaan urusan kebudayaan pada bidang kebudayaan untuk kegiatan ini, murni hanya bersumber dari PAD.

b. UPT Taman Budaya

Untuk mendukung terlaksananya pengembangan OPK di provinsi NTB, berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh UPT Taman Budaya sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini :

Tabel : 2.2.1.4
Kalender Kegiatan Taman Budaya
yang telah dilaksanakan sampe dengan bulan Oktober Tahun 2024

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL & BULAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pentas Seni Religi	27 s/d 29 April 2024	Panggung Terbuka	
2	Pergelaran Musik Performance	1 Juni 2024	Panggung Tertutup	
3	Pameran Seni Rupa	14 s/d 21 Juni 2024	Galeri Taman Budaya NTB	
4	Evaluasi Olah Seni I	15 Juni 2024	Panggung Terbuka	
5	Pergelaran Dance Performance	22 Juni 2024	Panggung Tertutup	
6	Pergelaran Musikalisasi Puisi	13 Juli 2024	Panggung Tertutup	
7	Gebayar Seni Tradisi	27 s/d 29 Juli 2024	Panggung Terbuka	
8	Pergelaran Teater Tradisional	04 Agustus 2024	Panggung Tertutup	
9	Gebayar Seni Sekolah Luar Biasa	11 s/d 12 Agustus 2024	Panggung Tertutup	
10	Pergelaran Teater Modern	30 s/d 31 Agustus 2024	Panggung Tertutup	
11	Eksperimentasi Teater	05 Oktober 2024	Panggung Tertutup	
12	Gebayar Seni Pelajar	09 s/d 11 Oktober 2024	Panggung Terbuka	

Dari table diatas terlihat ada 12 event yang diselenggarakan oleh taman budaya di tahun 2024 yang telah dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan Oktober 2024. Selain itu terdapat 7 (tujuh) event lagi yang akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2024 yaitu yaitu : (1) Pergelaran etnik music (2) Pergelaran music night (3) pergelaran wayang (4) Festival Seni NTB (5) Wayang Orkestra dan Gamelan Pesantren (6) Eksperimen tari (7) Evaluasi olah seni II.

2.3 PERMASALAHAN

Urusan Pendidikan :

Dalam pelaksanaan urusan Pendidikan tahun 2024 masih ditemukan beberapa kendala secara umum meliputi :

1. Serapan anggaran sampai dengan bulan September 2024 belum maksimal terutama yang bersumber dari dana DAK karena ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan juklak juknis pelaksanaan DAK, belum terpenuhinya syarat yang ditentukan, terdapat bahan baku yang dipersyarikat namun ketersediaan bahan sangat terbatas;
2. Kegiatan seperti pendataan ATS penyandang disabilitas seharusnya sudah dapat dilakukan namun kerena server dari Pusdatin-RI sedang mengalami maintenance sehingga penarikan data terhambat maka data yang akan di share ke pihak desa untuk mendata keberadaan anak tidak sekolah belum bisa dilakukan.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan penyesuaian sehingga diusulkan pada tahapan perubahan anggaran belum bisa dieksekusi karena menunggu dokumen penganggaran ditetapkan;
4. Beberapa indikator utama seperti APK, APM, APS belum dapat dilakukan perhitungan karena menunggu data terbaru dari kemenag;
5. Capaian untuk indikator lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi belum mencapai target yang ditetapkan karena belum semua sekolah melakukan penginputan data pada aplikasi tracer study
6. Data akreditasi sekolah belum dilakukan update pada aplikasi DAPODIKk sehingga capaian atahun 2024 sampai bulan September masih sam adengan capaian tahun lalu.

Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dijumpai terkait urusan kebudayaan pada tahun 2024 :

1. Realisasi indikator OPK dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan karena dari 12 (dua belas) OPK yang ada, hanya mampu diintervensi 10 (sepuluh) OPK dan 2 (dua) OPK lainnya tidak mampu diintervensi karena intervensinya dilakukan melalui kajian teknis yang tentunya berbiaya sedangkan anggaran pada bidang kebudayaan sangat terbatas, mengingat sumber dana untuk kegiatan ini bersumber dari PAD saja.

2. Terbatasnya SDM bidang kebudayaan seperti tenaga ahli kebudayaan mengakibatkan lambatnya pelayanan urusan kebudayaan yang akhirnya berpengaruh terhadap tinggi rendahnya capaian indikator bidang kebudayaan.

2.4 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait ketidak sesuaian kondisi di lapangan dengan ketentuan pada juklak dan juknis pelaksanaan DAK, dan untuk tahun yang akan datang hendaknya dilakukan verifikasi yang lebih ketat sehingga tidak menjadi hambatan pada tahap pelaksanaan terkait persyaratan penerima DAK;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mencari Solusi terkait ATS yang terpilih agar dapat didistribusikan ke pihak desa untuk segera dilakukan verval;
3. Mempersiapkan dokumen pendukung seperti kelengkapan administrasi untuk beberapa kegiatan yang anggarannya dilakukan perubahan sehingga saat anggaran perubahan telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan agar tidak melewati batas wakat yang telah ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Kemenag untuk mendapatkan data terkait jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang MA/MAK;
5. Untuk meningkatkan capaian indikator SMA yang melanjutkan dan SMK terserap hendaknya melakukan sosialisasi dan validasi data ke satuan Pendidikan dan meminta satuan Pendidikan melakukan updating pengisian aplikasi tracer study yang telah disiapkan dinas;
6. Dalam peningkatan validitas data akreditasi sekolah dinas hendaknya meminta satuan Pendidikan untuk melakukan updating data pada aplikasi DAPODIK terkait status aktreditasi sekolah tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan skla prioritas untuk anggaran bidang kebudayaan sehingga kegiatan yang sifatnya prioritas dan memiliki daya ungkit yang tinggi dapat ditingkatkan anggarannya untuk pencapaian yang lebih maksimal;
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM kebudayaan untuk mendukung terlaksananya pelayanan bidang kebudayaan dengan lebih optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan panduan bagi Dinas dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan tujuan sesuai Renstra 2024 – 2026 yaitu :

1. Terwujudnya jangkauan layanan Pendidikan yang berkualitas
2. Terwujudnya pemajuan pembangunan kebudayaan;

3.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran dari dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas DIKBUD Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Target Kinerja
						Tujuan/sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya jangkauan layanan pendidikan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	17
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	9,55

		Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	APK SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	115,78	100
			APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	98,50	98,65
			APS pendidikan menengah	Persen	98,85	98,90
			APS SLB	Persen	87,74	88
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	Persen	65,82	65,90
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Persen	55,56	55,70
			Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)	Persen	67,32	67,55
			Persentase Lulusan SMK yang terserap	Persen	54	56
		Meningkatnya Pemenuhan SPM Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	75%	100%
			Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	75%	100%
2.	Terwujudnya Pemajuan Pembangunan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	NA	54-60
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	83,33	84

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN 2025 (terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2025 ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian program prioritas daerah tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPD tahun 2024-2026, selain itu dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan sebagai dasar evaluasi serta laporan atas kinerja 1 (satu) tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan terutama pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Harapan kami semoga Rencana Kerja pembangunan pendidikan dan Kebudayaan ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan di provinsi Nusa Tenggara Barat.

